



## Negosiasi Pengembangan Ekowisata pada Ruang Hidup dan Identitas Masyarakat Adat Waropen

Fransiscus Xaverius Mote\*, Pawennari Hijjang, Agustina Ivonne Poli, Gerdha K. I. Numberi

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\* E-mail Korespondensi Penulis: [bogaya07@gmail.com](mailto:bogaya07@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

ecotourism, Waropen indigenous people, space negotiation, cultural identity, cultural commodification

#### **How to Cite:**

Mote, F.X., Hijjang, P. Poli, A.I., Number, G.K.I (2026). Negosiasi Pengembangan Ekowisata pada Ruang Hidup dan Identitas Masyarakat Adat Waropen. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 14(1): 1-9.

#### **DOI:**

10.31957/jeb.v14i1.5439

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the dynamics of ecotourism negotiations in relation to the living space and identity of the Waropen indigenous community in the coastal region of Papua. This study uses a qualitative approach with the perspectives of tourism anthropology and political ecology to understand how interactions between local communities, the state, and external actors shape ecotourism practices. The results show that ecotourism functions not only as an alternative economic strategy but also as an arena of contestation involving the production of space, the transformation of identity, and the utilization of cultural capital within unequal power relations. The Waropen indigenous community actively negotiates the meaning of their commodified living space, while strategically constructing a cultural identity in response to the demands of the tourism industry, resulting in a form of cultural hybridity. On the other hand, ecotourism practices also give rise to ambivalence, as they open economic opportunities while simultaneously potentially reducing the symbolic and spiritual value of local culture through the phenomena of staged authenticity and cultural commodification. These findings emphasize that indigenous communities are not entirely passive, but rather possess agency in maintaining spatial sovereignty and identity through various adaptive and resistance strategies. This study concludes that the success of indigenous community-based ecotourism is highly dependent on the recognition of customary rights, the integration of local knowledge, and substantive participation in the management and distribution of benefits.*

Copyright © 2026 JEB. All rights reserved.

---

**INFO ARTIKEL**

**Kata Kunci:**

ekowisata, masyarakat adat waropen, negosiasi ruang, identitas budaya, komodifikasi budaya

**Cara Mengutip:**

Mote, F.X., Hijjang, P. Poli, A.I., Number, G.K.I (2026). Negosiasi Pengembangan Ekowisata pada Ruang Hidup dan Identitas Masyarakat Adat Waropen. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 14(1): 1-9.

**DOI:**

10.31957/jeb.v14i1.5439

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika negosiasi ekowisata dalam kaitannya dengan ruang hidup dan identitas masyarakat adat Waropen di kawasan pesisir Papua. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif antropologi pariwisata dan ekologi politik untuk memahami bagaimana interaksi antara masyarakat lokal, negara, dan aktor eksternal membentuk praktik ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekowisata tidak hanya berfungsi sebagai strategi ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai arena kontestasi yang melibatkan produksi ruang, transformasi identitas, dan pemanfaatan modal budaya dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Masyarakat adat Waropen secara aktif menegosiasikan makna ruang hidup mereka yang mengalami komodifikasi, sekaligus mengonstruksi identitas budaya secara strategis dalam menghadapi tuntutan industri wisata, sehingga menghasilkan bentuk hibriditas budaya. Di sisi lain, praktik ekowisata juga memunculkan ambivalensi, karena membuka peluang ekonomi sekaligus berpotensi mereduksi nilai simbolik dan spiritual budaya lokal melalui fenomena staged authenticity dan komodifikasi budaya. Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat adat tidak sepenuhnya pasif, melainkan memiliki agensi dalam mempertahankan kedaulatan ruang dan identitas melalui berbagai strategi adaptif dan resistensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan ekowisata berbasis masyarakat adat sangat bergantung pada pengakuan hak ulayat, integrasi pengetahuan lokal, serta partisipasi substantif dalam pengelolaan dan distribusi manfaat.

Hak Cipta© 2026 JEB. Seluruh Hak Cipta.

---

**1. Pendahuluan**

Kawasan mangrove di Kabupaten Waropen, Papua, merupakan lanskap ekologis yang tidak hanya penting secara biologis tetapi juga sarat dengan makna sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat adat pesisir, di mana ruang tersebut berfungsi sebagai sumber kehidupan sekaligus ruang identitas kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif antropologi lingkungan, relasi antara manusia dan alam di masyarakat adat tidak bersifat eksploitatif, melainkan relasional dan kosmologis, sebagaimana dijelaskan oleh Descola (2006) bahwa alam dipahami sebagai bagian dari jaringan makna yang hidup. Oleh karena itu, mangrove di Waropen tidak dapat direduksi hanya sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup (*lebenswelt*) yang menyatukan praktik subsistensi, sistem pengetahuan lokal, dan relasi spiritual. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap intervensi pembangunan, termasuk ekowisata, akan berdampak langsung pada struktur sosial dan identitas budaya masyarakat adat. Dalam konteks ini, ruang mangrove menjadi arena penting dalam memahami bagaimana identitas dan ruang hidup dinegosiasikan. Dengan demikian, penelitian tentang negosiasi ekowisata di Waropen perlu diletakkan dalam kerangka hubungan kompleks antara ekologi, budaya, dan kekuasaan.

Dalam beberapa dekade terakhir, ekowisata berbasis komunitas semakin dipromosikan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang mampu mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Stronza (2001) bahwa ekowisata menjadi titik temu antara ekonomi, konservasi, dan partisipasi masyarakat. Di Waropen, inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap degradasi lingkungan dan keterbatasan akses ekonomi, dengan menjadikan kawasan mangrove sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa ekowisata tidak selalu berjalan sebagai ruang yang netral, melainkan sering menjadi arena kontestasi antara berbagai aktor, termasuk negara, pasar, dan masyarakat lokal (West & Carrier, 2004). Dalam praktiknya, program ekowisata sering membawa logika eksternal yang berpotensi menggeser sistem nilai lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang mengontrol ruang, siapa yang menentukan narasi budaya, dan siapa yang memperoleh manfaat dari pengembangan tersebut. Oleh karena itu, ekowisata harus dipahami tidak hanya sebagai proyek ekonomi, tetapi juga sebagai proses sosial-politik yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dinamika tersebut secara kritis.

Salah satu implikasi utama dari pengembangan ekowisata adalah munculnya praktik komodifikasi budaya, di mana unsur-unsur budaya lokal direpresentasikan ulang untuk memenuhi kebutuhan pasar wisata. MacCannell (2013) menyebut fenomena ini sebagai *staged authenticity*, yaitu proses di mana budaya ditampilkan dalam bentuk yang telah disusun agar tampak “otentik” bagi wisatawan. Dalam konteks ini, budaya tidak lagi semata menjadi ekspresi identitas, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang dipertukarkan dalam pasar global. Kirshenblatt-Gimblett (1998) menambahkan bahwa warisan budaya dalam pariwisata merupakan hasil konstruksi ulang yang sering kali memisahkan budaya dari konteks aslinya. Di Waropen, praktik ini terlihat dari transformasi ritual adat dan narasi lokal menjadi atraksi wisata yang dikurasi sesuai imajinasi wisatawan. Proses ini berpotensi mereduksi makna budaya sekaligus melemahkan kontrol masyarakat adat atas representasi diri mereka. Namun demikian, masyarakat adat tidak sepenuhnya pasif, melainkan juga melakukan berbagai strategi adaptasi dan negosiasi. Oleh karena itu, penting untuk melihat komodifikasi budaya sebagai arena interaksi yang dinamis antara dominasi dan agensi lokal.

Selain aspek budaya, pengembangan ekowisata juga berdampak pada transformasi ruang hidup masyarakat adat melalui proses produksi sosial ruang. Henri & Donald, (1991) menegaskan bahwa ruang bukanlah entitas netral, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Dalam konteks ekowisata, ruang adat yang sebelumnya dikelola secara komunal melalui hukum ulayat mengalami reorganisasi menjadi zona konservasi, destinasi wisata, dan ruang ekonomi yang dikendalikan oleh aktor eksternal. Proses ini sering kali menimbulkan konflik antara sistem penguasaan ruang berbasis adat dengan regulasi negara dan kepentingan pasar (Peluso & Vandergeest, 2011). Lebih lanjut, Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa modal budaya masyarakat adat seperti pengetahuan lokal dan praktik ritual dapat menjadi sumber daya strategis dalam arena pertukaran sosial dan ekonomi. Dalam konteks Waropen, modal budaya tidak hanya menjadi objek eksploitasi, tetapi juga digunakan sebagai alat tawar dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan demikian, ruang dan budaya menjadi dua dimensi yang saling terkait dalam proses negosiasi ekowisata. Hal ini menunjukkan bahwa analisis ekowisata harus mencakup dimensi spasial, simbolik, dan ekonomi secara simultan.

Dinamika ekowisata di wilayah adat seperti Waropen juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka postkolonial dan ekologi politik yang menyoroti ketimpangan relasi global-lokal dalam pengelolaan sumber daya. Hall dan Tucker (2004) menegaskan bahwa pariwisata sering menjadi medium reproduksi kekuasaan melalui representasi budaya yang bias dan eksotis. Sementara itu, Büscher dan Dressler (2007) menunjukkan bahwa ekowisata sering beroperasi dalam logika neoliberalisme hijau, di mana alam dan budaya dikomodifikasi dalam narasi keberlanjutan. Dalam konteks Papua, kondisi ini menjadi lebih kompleks karena adanya sejarah marginalisasi dan konflik struktural yang mempengaruhi posisi tawar masyarakat adat. Studi West & Carrier (2016) juga menunjukkan bahwa proyek konservasi dan pariwisata di Papua Nugini sering menghasilkan ketimpangan dan dispossession terhadap masyarakat lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin menguatnya intervensi eksternal dalam pengelolaan ekowisata yang berpotensi menggeser kedaulatan ruang dan identitas budaya masyarakat adat, sehingga tanpa kajian kritis, praktik pembangunan justru dapat memperdalam marginalisasi yang ingin diatasi. Selain itu, penelitian ini penting karena memberikan kontribusi empiris dari konteks Papua, khususnya Waropen yang masih relatif terbatas dalam literatur global mengenai ekowisata berbasis komunitas dan ekologi politik. Secara state of the art, studi ini tidak hanya mengkaji ekowisata sebagai praktik ekonomi atau konservasi, tetapi menempatkannya sebagai arena negosiasi identitas, kekuasaan, dan produksi ruang yang mengintegrasikan perspektif antropologi lingkungan, komodifikasi budaya, dan ekologi politik secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk pendekatan integratif yang menempatkan agensi masyarakat adat sebagai pusat analisis dalam menghadapi dinamika globalisasi pariwisata.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana masyarakat adat Waropen menegosiasikan identitas, ruang hidup, dan modal budaya mereka dalam menghadapi tekanan tersebut. Dengan pendekatan etnografi kritis, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dinamika agensi lokal dalam struktur ketimpangan global. Pada akhirnya, kajian ini penting untuk merumuskan model ekowisata yang lebih adil, partisipatif, dan berbasis pada kedaulatan masyarakat adat.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi kritis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika negosiasi ekowisata dalam ruang hidup dan identitas masyarakat adat Waropen, sekaligus mengungkap relasi kuasa, representasi budaya, dan praktik komodifikasi yang menyertainya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada deskripsi realitas sosial, tetapi juga pada analisis reflektif terhadap struktur dominasi yang terbentuk dalam interaksi antara masyarakat adat, negara, dan aktor eksternal (Madison, 2011). Lokasi penelitian berada di kawasan pesisir Kabupaten Waropen, Papua, yang dipilih secara purposive karena memiliki karakteristik ekosistem mangrove yang luas serta praktik budaya adat yang masih hidup dan terlibat dalam pengembangan ekowisata. Dalam perspektif teori ruang, lokasi ini dipahami sebagai ruang sosial yang diproduksi melalui relasi kuasa dan praktik representasi (Henri & Donald, 1991), sekaligus sebagai arena kontestasi antara kepentingan konservasi, ekonomi, dan kedaulatan budaya (Nepal & Saarinen, 2016). Dengan demikian, pendekatan dan lokasi penelitian ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap interaksi kompleks antara budaya, ruang, dan pariwisata dalam konteks masyarakat adat.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data kualitatif primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi visual, serta analisis dokumen kebijakan dan materi promosi wisata. Data primer mencakup pengalaman, narasi, dan praktik sosial masyarakat adat dalam merespons ekowisata, sedangkan data sekunder digunakan untuk memperkuat konteks analisis melalui triangulasi sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif dengan mengombinasikan observasi partisipan sebagai metode utama etnografi (Adams, 2025), wawancara semi-terstruktur untuk menggali subjektivitas dan memori kolektif, serta dokumentasi visual dan pemetaan partisipatif untuk memahami representasi ruang dan budaya (Pink, 2015). Selain itu, analisis diskursus digunakan untuk mengkaji konstruksi identitas budaya dalam narasi pariwisata dan kebijakan (Fairclough, 2003). Sumber data melibatkan berbagai aktor seperti tokoh adat, masyarakat lokal, pelaku wisata, dan pemerintah, sehingga memungkinkan analisis multiperspektif terhadap fenomena yang diteliti (Stronza & Gordillo, 2008). Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh mampu menggambarkan kompleksitas relasi sosial dan budaya dalam ekowisata berbasis adat.

Penentuan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap praktik ekowisata, serta mengikuti prinsip saturasi data untuk menjamin kedalaman informasi. Analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik-kritis berbasis grounded theory konstruktivis melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antar konsep. Proses analisis ini memungkinkan peneliti mengembangkan konsep teoretis dari data lapangan secara induktif, khususnya terkait negosiasi identitas, komodifikasi budaya, dan transformasi ruang dalam ekowisata. Validitas penelitian dijaga melalui teknik triangulasi, member checking, dan audit trail untuk memastikan kredibilitas dan transparansi temuan. Selain itu, reflektivitas peneliti menjadi bagian penting dalam memahami posisi dan interpretasi terhadap data dalam kerangka etnografi kritis (Madison, 2011). Dengan demikian, keseluruhan metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang mendalam, kritis, dan kontekstual terhadap dinamika ekowisata berbasis adat di Waropen.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Ekowisata di kawasan mangrove Waropen bukan sekadar praktik ekonomi alternatif, melainkan arena sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan antara negara, pasar, dan masyarakat adat dalam satu ruang kontestasi yang kompleks. Transformasi kawasan mangrove menjadi destinasi wisata menciptakan perubahan signifikan dalam cara masyarakat memaknai ruang hidup mereka, dari ruang subsisten dan spiritual menjadi ruang produksi ekonomi berbasis wisata. Fenomena ini sejalan dengan konsep produksi sosial ruang yang dikemukakan Henri & Donald (1991), di mana ruang tidak netral melainkan dikonstruksi melalui relasi kuasa dan kepentingan politik-ekonomi. Dalam konteks Waropen, ruang adat mengalami re-teritorialisasi melalui kebijakan konservasi dan pengembangan wisata yang sering kali tidak sepenuhnya berbasis pada logika lokal. Akibatnya, muncul ketegangan antara ruang hidup (*lived space*) masyarakat adat dengan ruang konsepsi (*conceived space*) yang dirancang oleh negara dan aktor eksternal. Kondisi ini menegaskan bahwa ekowisata merupakan arena negosiasi ruang yang dinamis dan penuh konflik laten.

Dari sisi identitas, penelitian menemukan bahwa masyarakat adat Waropen terlibat aktif dalam proses negosiasi identitas budaya mereka di tengah tuntutan

industri wisata. Identitas adat tidak lagi bersifat statis, melainkan menjadi sesuatu yang dinegosiasikan secara strategis untuk merespons kebutuhan pasar dan ekspektasi wisatawan. Hal ini selaras dengan gagasan Comaroff dan Comaroff (2009) tentang komodifikasi etnisitas, di mana identitas budaya berubah menjadi aset ekonomi dalam kapitalisme global. Dalam praktiknya, masyarakat menampilkan simbol budaya tertentu yang dianggap “menarik” bagi wisatawan, sementara aspek lain yang lebih kompleks atau sakral cenderung disembunyikan. Proses ini menunjukkan adanya seleksi budaya yang tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa dan logika pasar. Dengan demikian, identitas budaya menjadi arena performatif yang terus dibentuk ulang dalam interaksi antara lokal dan global. Negosiasi ini mencerminkan strategi adaptif sekaligus risiko reduksi makna budaya.

Praktik komodifikasi budaya dalam ekowisata Waropen tampak jelas melalui fenomena *staged authenticity*, di mana unsur-unsur budaya lokal ditampilkan dalam bentuk yang telah disesuaikan dengan imajinasi wisata. MacCannell (2013) menjelaskan bahwa dalam pariwisata modern, “keaslian” sering kali merupakan konstruksi yang dipentaskan untuk memenuhi ekspektasi wisatawan, bukan refleksi realitas budaya yang utuh. Di Waropen, ritual adat yang sebelumnya sakral mengalami transformasi menjadi pertunjukan publik yang terjadwal dan terkurasi. Hal ini menyebabkan terjadinya reduksi makna simbolik dan spiritual dalam praktik budaya tersebut. Namun demikian, masyarakat tidak sepenuhnya pasif dalam proses ini, melainkan turut mengatur bagaimana budaya mereka direpresentasikan. Dengan kata lain, komodifikasi budaya di Waropen bersifat ambivalen: di satu sisi membuka peluang ekonomi, di sisi lain berpotensi menggerus otentisitas dan kontrol budaya lokal.

Modal budaya memainkan peran penting sebagai instrumen negosiasi dalam relasi antara masyarakat adat dan aktor eksternal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan lokal, narasi leluhur, serta praktik ekologis tradisional digunakan sebagai alat tawar untuk mempertahankan posisi dalam proyek ekowisata. Bourdieu (1986) mendefinisikan modal budaya sebagai sumber daya simbolik yang dapat dikonversi menjadi keuntungan sosial maupun ekonomi dalam medan tertentu. Dalam konteks Waropen, modal budaya tidak hanya menjadi objek eksploitasi, tetapi juga sarana resistensi terhadap dominasi eksternal. Masyarakat memanfaatkan legitimasi adat untuk menegaskan hak ulayat dan mengontrol akses terhadap sumber daya wisata. Hal ini menunjukkan bahwa modal budaya bersifat dinamis dan dapat digunakan secara strategis dalam situasi ketimpangan. Dengan demikian, masyarakat adat tampil sebagai aktor aktif yang memiliki agensi dalam proses negosiasi.

Ekowisata di Waropen juga memperlihatkan karakteristik sebagai bentuk *green neoliberalism*, di mana alam dan budaya dikemas sebagai komoditas dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan argumen Büscher dan Dressler (2007) serta West dan Carrier (2004) yang menyatakan bahwa ekowisata sering menjadi instrumen baru dalam kontrol terhadap ruang dan sumber daya lokal. Dalam praktiknya, proyek konservasi dan wisata sering kali membawa logika pasar yang mengabaikan sistem nilai dan kosmologi lokal. Penetapan zona konservasi tanpa konsultasi adat, misalnya, menunjukkan adanya marginalisasi pengetahuan lokal dalam tata kelola ruang. Hal ini menciptakan konflik antara kepentingan konservasi global dan kebutuhan hidup masyarakat lokal. Ekowisata, dalam konteks ini, bukan hanya proyek lingkungan, tetapi juga proyek politik yang sarat kepentingan. Oleh karena itu, analisis ekologi politik menjadi penting untuk memahami dinamika tersebut.

Meskipun menghadapi tekanan struktural, masyarakat adat Waropen menunjukkan berbagai bentuk agensi dalam merespons ekowisata. Mereka mengembangkan strategi seperti pembentukan forum adat-wisata, pemetaan partisipatif wilayah ulayat, serta produksi narasi tandingan melalui media lokal. Temuan ini sejalan dengan Stronza (2001) yang menekankan bahwa masyarakat lokal tidak selalu menjadi korban dalam pariwisata, tetapi dapat menjadi aktor strategis yang memanfaatkan peluang yang ada. Agensi ini juga terlihat dalam upaya menjaga batas antara ruang sakral dan ruang wisata. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya beradaptasi, tetapi juga berupaya membentuk ulang logika ekowisata sesuai dengan nilai-nilai adat mereka. Praktik ini menunjukkan adanya resistensi kultural yang bersifat kreatif dan kontekstual. Agensi lokal menjadi faktor kunci dalam menentukan arah perkembangan ekowisata.

penelitian ini menemukan adanya ketegangan antara konservasi ekologi dan kedaulatan budaya yang tidak selalu dapat diselaraskan secara mudah. Program ekowisata sering menekankan aspek pelestarian lingkungan, tetapi kurang memperhatikan dimensi sosial dan kultural masyarakat adat. Nepal dan Saarinen (2016) menegaskan bahwa pariwisata harus dipahami sebagai fenomena politik yang melibatkan konflik kepentingan, bukan sekadar aktivitas ekonomi atau konservasi. Di Waropen, praktik etnokonservasi seperti larangan adat (*pet-pet*) justru menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Namun, sistem ini sering diabaikan dalam kebijakan formal yang lebih mengedepankan pendekatan teknokratis. Akibatnya, terjadi disonansi antara kebijakan eksternal dan praktik lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi pengetahuan lokal dalam tata kelola ekowisata.

Negosiasi ekowisata di Waropen merupakan proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara ruang, identitas, dan modal budaya dalam konteks relasi kuasa global-lokal. Ekowisata tidak dapat dipahami sebagai solusi tunggal bagi pembangunan berkelanjutan, melainkan sebagai arena kontestasi yang memerlukan pendekatan kritis dan kontekstual. Pendekatan antropologi pariwisata menunjukkan bahwa keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat adat diakui sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan representasi budaya mereka. Temuan ini memperkuat argumen bahwa partisipasi yang substantif, bukan sekadar simbolik, menjadi kunci dalam menciptakan keadilan dalam pembangunan pariwisata (Hitchcock et al., 2009). Dengan demikian, ekowisata yang berkeadilan harus berbasis pada pengakuan hak ulayat, integrasi nilai lokal, dan distribusi manfaat yang setara. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas kajian antropologi pariwisata di wilayah Papua yang selama ini masih minim penelitian. Implikasinya tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga relevan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif.

#### **4. Kesimpulan**

Negosiasi ekowisata dalam ruang hidup dan identitas masyarakat adat Waropen menunjukkan bahwa ekowisata bukanlah ruang netral, melainkan arena kompleks yang mempertemukan berbagai kepentingan antara negara, pasar, dan komunitas lokal dalam relasi kuasa yang dinamis. Transformasi ruang mangrove menjadi destinasi wisata telah mengubah makna ruang dari yang bersifat kosmologis dan subsisten menjadi ruang ekonomi yang dikonstruksi melalui logika pembangunan dan konservasi modern. Dalam proses ini, masyarakat adat tidak kehilangan sepenuhnya kontrol, tetapi terlibat dalam negosiasi yang terus-menerus untuk

mempertahankan hak ulayat dan makna ruang hidup mereka. Temuan ini menegaskan bahwa produksi ruang dalam ekowisata selalu bersifat politis dan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang melingkupinya, sebagaimana ditegaskan dalam perspektif antropologi dan ekologi politik (Stronza, 2001). Oleh karena itu, keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada sejauh mana ruang hidup masyarakat adat diakui sebagai entitas sosial-kultural yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar komoditas wisata.

Selain itu, negosiasi identitas dan pemanfaatan modal budaya menunjukkan bahwa masyarakat adat Waropen memiliki agensi yang kuat dalam menghadapi tekanan globalisasi pariwisata, meskipun berada dalam struktur yang timpang. Identitas budaya tidak lagi bersifat tetap, tetapi dikonstruksi secara strategis sebagai bagian dari interaksi dengan pasar wisata, yang sering kali menghasilkan bentuk hibriditas antara nilai lokal dan tuntutan eksternal. Modal budaya, dalam hal ini, berfungsi ganda sebagai komoditas ekonomi sekaligus alat resistensi untuk mempertahankan kedaulatan simbolik dan kultural komunitas. Namun demikian, praktik komodifikasi dan staged authenticity tetap membawa risiko reduksi makna budaya serta marginalisasi pengetahuan lokal jika tidak diimbangi dengan kontrol komunitas yang kuat. Dengan demikian, ekowisata berbasis adat hanya dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan apabila menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pengelolaan, representasi, dan distribusi manfaat, bukan sekadar sebagai objek pembangunan.

### **Daftar Pustaka**

- Adams, K. M. (2025). Tourism ethnography and tourism geographies. *Tourism Geographies*, 27(3-4), 713-724.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Büscher, B., & Dressler, W. (2007). Linking neoprotectionism and environmental governance: On the rapidly increasing tensions between actors in the environment-development nexus. *Conservation and Society*, 5(4), 586–611.
- Butler, R., & Thompson-Carr, A. (Eds.). (2024). *The Routledge handbook of tourism and indigenous peoples*. London: Routledge.
- Comaroff, J. L., & Comaroff, J. (2009). *Ethnicity*, inc. University of Chicago Press.
- Descola, P. (2006, January). Beyond nature and culture. In *Proceedings-British Academy* (Vol. 139, p. 137). Oxford University Press Inc. Hall, C. M., & Tucker, H. (2014). *Tourism and postcolonialism*. Oxfordshire: Taylor & Francis.
- Henri, L., & Donald, N. S. (1991). *The production of space*. Cambridge: Blackwell.
- Hitchcock, M., King, V. T., & Parnwell, M. (Eds.). (2009). *Tourism in Southeast Asia: Challenges and new directions*. Nias Press.
- Kirshenblatt-Gimblett, B. (1998). *Destination culture: Tourism, museums, and heritage*. Univ of California Press.
- MacCannell, D. (2013). *The tourist: A new theory of the leisure class*. Univ of California Press.

- Madison, D. S. (2011). *Critical ethnography: Method, ethics, and performance*. Sage.
- Nepal, S. K., & Saarinen, J. (Eds.). (2016). *Political ecology and tourism* (pp. 1-15). London: Routledge.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2011). Political ecologies of war and forests: Counterinsurgencies and the making of national natures. *Annals of the Association of American Geographers*, 101(3), 587-608.
- Pink, S. (2015). *Doing sensory ethnography*. Sage.
- Stronza, A. (2001). Anthropology of tourism: Forging new ground for ecotourism and other alternatives. *Annual review of anthropology*, 30(1), 261-283.
- Stronza, A., & Gordillo, J. (2008). Community views of ecotourism. *Annals of tourism research*, 35(2), 448-468.
- West, P. (2016). *Dispossession and the environment: Rhetoric and inequality in Papua New Guinea*. Columbia University Press.
- West, P., & Carrier, J. (2004). Ecotourism and authenticity: Getting away from it all?. *Current anthropology*, 45(4), 483-498.
- Williams, S. (2014). *Tourism geography: Critical understandings of place, space and experience*. Routledge.